

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Duta Nusindo Semarang, 2018, *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Semarang: Cv Duta Nusindo Semarang
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Intruksi Menteri Dalam Negeri No.180/3935/SJ Tentang Pengawasan pungutan
Liar Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Surat Keputusan Gubernur Nomor 1072/XI/2016 Tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau

C. Skripsi/majalah/jurnal

Putri P. *Penerapan Peradilan Koneksitas Dalam Kasus Tindak Pidana Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang* . Skripsi. Tidak
Diterbitkan.Fakultas Hukum. Universitas Andalas: Padang.

Moh Toha Salahuddin, 2016, "Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana
Korupsi", *Paraikatte*, Vol. 26. Triwullan III.

Nizar Apriansyah, 2018, "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan
Integritas Aparatur", *JIKH*, No. 1.

D. Website dan Artikel

E-Journal.Uajy.Ac.Id/13565/3/Ta139792.Pdf

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>

https://id.wikipedia.org/wiki/rumah_tahanan_negara

<Https://Www.Transiskom.Com/2016/03/Pengertian-Studi-Kepustakaan.Html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi>

<http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf>

<Https://Www.Maxmanroe.Com/Vid/Sosial/Pengertian-Peran.Html>

<Https://Tirto.Id/Pelaku-Pungli-Rutan-Pekanbaru-Terima-Uang-Jutaan-Dari-Napi-Co4r>

Satgas_SABER_PUNGLI_oleh_menkoplhukam_RI.pdf

